

## Afnan-Singgih Dapat Tambahan Dukungan 4 Partai



Afnan Hadikusumo (tengah) bersama pimpinan Partai Golkar Kota Yogyakarta dan perwakilan parpol koalisi.

YOGYA (KR) - Koalisi partai politik pengusung paslon Afnan Hadikusumo-Singgih Raharjo di Pilkada Kota Yogyakarta semakin gemuk, karena bertambah empat partai lagi. Yaitu Partai Garuda, Partai Hanura, Partai Perindo dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Sebelumnya telah ada delapan parpol yang mengusung Afnan-Singgih, yaitu Partai Golkar, Gerindra, PKS, PPP, PKB, Partai Umat, PSI dan Partai Buruh.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Yogyakarta sekaligus ketua partai koalisi pengusung Afnan-Singgih, Dr Agus Mulyono menyambut baik tambahan dukungan dari parpol. Tambahan dukungan ini semakin menambah kekuatan koalisi untuk memenangkan Afnan-Singgih di

Pilkada Kota Yogyakarta 2024.

"Tapi karena saat pendaftaran paslon Afnan-Singgih di KPU Kota Yogyakarta, keempat parpol ini belum masuk dan tercatat, maka kami menyebutnya relawan. Relawan Garuda, Relawan Hanura, Relawan PKN dan Relawan Perindo," kata Agus kepada wartawan di sela acara peringatan HUT ke-60 Partai Golkar di Kantor DPD Partai Golkar DIY, Jalan Jenderal Sudirman Yogyakarta, Minggu (20/10).

Afnan Hadikusumo yang menghadiri acara mengucapkan selamat HUT ke-60 Partai Golkar seraya berterima kasih kepada Partai Golkar Kota Yogyakarta yang selama ini telah mendukung penuh Afnan-Singgih. Menurutnya, dukungan dari

kelompok relawan juga terus berdatangan dan menyatakan bergabung mendukung Afnan-Singgih.

Afnan mengatakan, jika nantinya mendapat amanah sebagai Walikota Yogyakarta, dirinya tetap mengharapkan dukungan dari masyarakat terutama partai koalisi pengusung. Menurutnya, perlu kolaborasi semua pihak untuk mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang semakin bersih, maju, sejahtera dan berbudaya.

"Kami tidak bisa bekerja sendiri tapi bekerja sama. Eksekutif dan legislatif harus berkolaborasi. Setelah Pilkada, partai koalisi harus terus berkolaborasi, jangan goyah," kata Afnan.

Agus Mulyono menambahkan, peringatan HUT ke-60 Partai Golkar diisi dengan sosialisasi paslon Afnan-Singgih, dilanjutkan ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusumanegara. Acara diikuti ratusan relawan yang dibentuk oleh para Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kota Yogyakarta. Sebelumnya, telah diadakan kegiatan Jumat Berkah dan aksi tebus murah sembako di 14 kementren se Kota Yogyakarta. (Dev)-f



## JAGA INTEGRITAS JELANG PILKADA

# Kesbangpol DIY Minta ASN dan Lurah Jaga Netralitas

YOGYA (KR) - Netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan lurah dalam Pilkada serentak sangat penting dan menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawarkan. Netralitas dalam Pilkada diperlukan untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Oleh karena itu Pemda DIY melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta (Kesbangpol DIY), mengingatkan agar ASN dan perangkat kalurahan agar menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada.

"Netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada sangat penting, termasuk dalam Pilkada serentak pada November mendatang. Apalagi aturan dan perintah terkait netralitas itu sudah jelas. Dimana semua ASN ter-

masuk lurah harus netral tidak boleh condong ke salah satu paslon, jadi harus dimengerti semua. Karena ketentuan dan aturannya sudah jelas kami minta semua pihak bisa menaati," kata Plt Kepala Badan Kesbangpol DIY Anna Rina Herbranti di Yogyakarta, Minggu (20/10).

Menurutnya, salah satu fenomena netralitas ASN yang sempat terjadi di Sleman beberapa waktu lalu perlu menjadi perhatian dan tidak boleh terulang lagi. Untuk itu pihak-

nya agar kasus itu segera diselesaikan dengan optimal oleh Pemkab. Bahkan seandainya terbukti bersalah sebaiknya diberikan sanksi yang sesuai dengan kriteria pelanggaran. Tentunya aturan itu berlaku di semua kabupaten/kota di DIY. Jadi pihaknya mewanti-wanti agar kabupaten/kota lain juga ikut menjaga netralitas ASN.

"Kami minta agar ASN di masa Pilkada untuk menjaga sikap dan tutur kata baik di sosial media maupun di acara-acara tertentu. Dengan begitu netralitas ASN bisa dijaga dengan optimal di wilayah setempat. Dalam bertutur kata juga hati-hati karena paslon ada singkatan-singkatan, termasuk saat memberi sambutan di forum harus hati-hati," ungkapnya. (Ria)-f

## PERANGKAT WILAYAH MAMPU TERAKOMODASI

# Naker Konstruksi Dipastikan Terlindungi Jamsostek

YOGYA (KR) - Pemkot Yogyakarta akan memastikan seluruh tenaga kerja jasa konstruksi yang menjalankan pekerjaan fisik di Kota Yogyakarta terlindungi jaminan sosial dan ketenagakerjaan (jamsostek). Selain telah diatur dalam undang-undang, tenaga kerja pada sektor tersebut juga memiliki risiko pekerjaan yang tinggi.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta Maryustion Tonang, mengaku pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara (BP) Jamsostek Yogyakarta terkait kepesertaan program jaminan perlindungan. "Satuan kerja atau organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkot Yogyakarta sudah kami berikan sosialisasi mengenai

hal itu. Ini menjadi upaya bersama agar pekerja jasa konstruksi yang terlibat dalam program pembangunan fisik Pemkot Yogyakarta terlindungi," tandasnya, Kamis (17/10).

Menurutnya, sejak tahun 2023 melalui APBD Kota Yogyakarta telah dialokasikan anggaran berupa iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek bagi perangkat di wilayah. Lebih dari 3.000 Ketua RT, RW, Kampung dan LPMK terlindungi BP Jamsosten untuk dua program jaminan yaitu kecelakaan kerja dan kematian.

Oleh karena itu, selain menjadi amanah dari undang-undang, keikutsertaan dalam program BP Jamsostek merupakan upaya bersama untuk mem-

berikan perlindungan bagi para pekerja. Termasuk ketika ada program pembangunan fisik di lingkup satuan kerja Pemkot Yogyakarta maka harus dipastikan jasa konstruksi atau pihak ketiga pelaksana telah mendaftarkan proyeknya dalam perlindungan BP Jamsostek.

Sementara itu Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta Rudi Susanto, menyatakan BP Jamsostek merupakan program pemerintah yang sudah diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah serta peraturan turunannya dari pusat hingga ke daerah. Sehingga hal tersebut menjadi penting dan harus diupayakan bersama dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat. (Dhi)-f

## MENTERI PELANCONGAN SERAWAK KETEMU SULTAN

# Tingkatkan Kerja Sama Budaya dan Pariwisata

YOGYA (KR) - Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, YB Dato Sri Abdul Karim Rahman Hamzah melakukan pertemuan dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Jumat (18/10). Dalam pertemuan itu YB Dato Sri Abdul Karim menyatakan bahwa pemerintah Sarawak ingin menjalin kerja sama dengan Pemda DIY dalam berbagai hal. Salah satunya bidang kebudayaan dan pariwisata.

Ditemui usai pertemuan, Sekretaris Daerah DIY Beny Suharsono mengatakan, kunjungan Pemerintah Sarawak dalam rangka menjalin kerja sama dari berbagai hal, salah satunya adalah kebudayaan yang perlu dikembangkan antara DIY dengan Sarawak. Menteri Pelancongan Sarawak ingin menjajaki lebih dalam berbagai bidang budaya yang ada di Yogyakarta.

"Banyak hal yang sepadan antara Yogyakarta dengan Sarawak, contohnya soal kuliner. Terkait dengan kuliner ini, ternyata menjadi daya tarik sendiri bagi Pemerintah Sarawak yang ingin menjajaki lebih jauh karena beliau (Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan

Sarawak) sangat menikmati kuliner-kuliner yang ada di Yogyakarta," kata Beny Suharsono.

Dikatakan, Pemerintah Sarawak mengundang Sultan secara langsung untuk hadir ke Sarawak membawa misi budaya. Selain itu terkait pariwisata Sarawak yang saat ini sedang membangun maskapai baru dengan harapan adanya direct flight ke Yogyakarta.

Sementara itu, Kepala Dinas DPMPT-SP DIY Agus Priono mengungkapkan, kedatangan Menteri Pelancongan Sarawak juga untuk memenuhi undangan pada acara Festival Batik yang diadakan di Yogyakarta. Kemudian, terkait dengan kerja sama yang akan dilakukan ini, mengingat Yogyakarta menjadi tempat favorit bagi orang Malaysia dalam berwisatawan, sehingga menarik bagi mereka untuk menjajaki DIY.

"Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan dapat memberi dampak yang signifikan juga untuk DIY. Misalnya, semakin banyak turis Malaysia yang datang ke Yogyakarta dan tentu itu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang positif bagi masyarakat DIY," terangnya. (Ria)-f

## KEMAH SANTRI MUHAMMADIYAH NASIONAL

# Ketua PWM DIY: Tantangan Kader Kian Berat



Pelepasan Kontingen DIY KSM Nasional.

YOGYA (KR) - Kemah Santri Muhammadiyah (KSM) Nasional menjadi momentum penting untuk menanamkan jiwa Muhammadiyah, yakni kader yang militan, unggul spiritualnya. "Menjadi kader syaratnya tidak ringan, kian berat. Makanya kader yang masih ragu dan bimbang lebih baik pulang. Kader mengemban amanah persyarikatan, amanah bangsa tantangan berat dibandingkan sekarang," kata Dr Muhammad Ikhwan Ahada SAG MA, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY saat melepas 154 santri terdiri 15 regu berasal dari 10 pesantren Muhamma-

diyah DIY dari Masjid PWM DIY, Jalan Gedongkuning, Rejowinangun Kotagede, Kota Yogyakarta, Minggu (20/10).

Para santri diberangkatkan ke Kemah Santri Muhammadiyah Nasional di Bumi Perkemahan Karanganyar Jawa Tengah, 20 - 22 Oktober yang bertema 'Menyambung Juang, Merengkuh Masa Depan'. Sebelum pemberangkatan dilepas pemberi pengantar Agus Saeful Bahri SAG MSi (Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren/LPP PWM DIY) dan Dr Nur Ahmad Ghozali (Wakil Ketua PWM DIY).

Sedangkan Agus Saeful Bahri dalam sambutan

mengatakan, kegiatan ini diikuti 154 santri dari 10 pesantren Muhammadiyah, yakni Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta, MBS Prambanan, MBS Pleret, Pondok Pesantren Asy Syifa Muhammadiyah Bantul, PPTS Al Mansyur Bantul, MBS Al Mujahidin Wonosari, PPTQ Ibnu Juraimi Yogyakarta, PP Al Amin Kotagede dan PP Darul Ulum Galur Kulonprogo. "Dalam Kemah Santri Muhammadiyah Nasional pertama kalinya ini, kuotanya dibatasi," ujarnya. Untuk kegiatan ini LPP PWM DIY persiapannya selama 2 bulan.

Sementara itu, Nur Ahmad Ghozali dalam sambutan mengatakan, Kemah Santri Muhammadiyah ini suatu kegiatan positif. "Setidaknya kegiatan ini menjadi media silaturahmi lintas kader dari Muhammadiyah secara nasional. Selain itu, Kemah Santri Muhammadiyah Nasional membangun komitmen keislaman, kebangsaan dan kemuhammadiyahannya." ujarnya. (Jay)-f

## DWI CANDRA PUTRA

# Menapaki Periode Kedua, Kawal Pemberdayaan Masyarakat



KOTA YOGYAKARTA

awal berbagai program yang berkaitan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Yogyakarta ini, tahun 2024 sebetulnya merupakan fase recovery dampak pandemi Covid-19. Hal ini karena selama dua tahun APBD Kota Yogyakarta berdampak hingga memasuki masa darurat pada 2023. "Fakta bahwa tahun ini merupakan recovery dari pandemi Covid-19. Oleh karena itu seharusnya banyak kegiatan pembangunan yang berbasis wilayah dengan melibatkan masyarakat," urainya.

Tidak bisa dipungkiri meski secara makro pertumbuhan ekonomi sudah menunjukkan ke arah positif namun belum semua masyarakat yang sebelumnya terdampak pandemi juga ikut pulih.



KR-Ardhi Wahdan

Sehingga sudah menjadi kewajiban bagi wakil rakyat yang ada di lembaga dewan untuk terus mengawal program pemberdayaan masyarakat. Candra yang pada periode sebelumnya duduk di Komisi A mampu memahami betul kondisi aparatur wilayah. Hal ini seiring mitra kerja eksekutif yang meliputi kelurahan maupun kementren yang banyak mengampu program pemberdayaan masyarakat.

Di samping itu, pria yang tidak pernah lepas dari aktivitas membaca buku dan artikel ini juga memiliki perhatian terkait konstruksi APBD Kota Yogyakarta. Pasalnya, merujuk Undang-undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), sektor belanja pegawai dibatasi maksimal 30 persen dari APBD. Sedangkan saat ini saja belanja pegawai di Kota Yogyakarta masih di angka 36 persen. "Aturan itu harus segera disesuaikan supaya belanja untuk infrastruktur publik menjadi lebih tinggi. Tentu ini harus diimbangi dengan bagaimana Pemkot mampu mendongkrak sektor pendapatan daerah," tandas pria 36 tahun ini.

Candra pun mendorong supaya APBD Kota Yogyakarta bisa menembus Rp 2 triliun tersebut juga dibarengi dengan kemandirian daerah dalam menggaet pendapatan. Hal ini agar kemampuan fiskal daerah semakin mandiri serta tidak memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap dana transfer dari pusat. (Dhi)-f